Media Ekonomi dan Bisnis
Volume 2 Nomor 1 Januari 2025 Halaman 81-87 ISSN (Online) 3063-6566

Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta

Parikesit Nurul Maysyarah[1], Junita Veronika[2], Maria Maxima Ede Poe[3], Sri Hainah Manihuruk[4]

[1,2,3,4]Universitas Bina Sarana Informatika
Jl. Kramat Raya No 98, Jakarta Pusat, Indonesia

email korespondensi*: nurulmaysyarah23@gmail.com

Abstrak
Salah satu indikator yang digunakan dalam pengelolaan anggaran daerah dan keberhasilan proyek pembangunan adalah menggunakan dana daerah secara efisien dan efektif. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah Surakarta sudah transparan dan akuntabel dalam menggunakan dana daerahnya. Teknik penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menggunakan data sekunder berupa laporan anggaran pendapatan dan anggaran belanja periode 2020-2022 daerah pemerintah Surakarta yang diunduh langsung dari website pemerintah Surakarta. Kemudian data dianalisis menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil dari studi ini yaitu menyebutkan (1) pemerintah memiliki transparansi dalam pengelolaan dana daerahnya karena setiap orang mempunyai akses terhadap laporan keuangan (2) rasio efisiensi dan rasio efektivitas juga cenderung menurun memperlihatkan pengelolaan pemerintah kurang stabil, jadi dapat disimpulkan pengelolaan dana oleh pemerintah Surakarta belum akuntabel.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Efisiensi

Abstracts
One indicator used in the management of local budgets and the success of the development project is to use regional funds efficiently and effectively. This study aims to determine whether Surakarta's government has been transparent and accountable in using its local funds. The research technique uses descriptive method with qualitative approach. The study uses secondary data in the form of the Revenue Budget Report and Budget Period of 2020-2022 Region of Surakarta Government is downloaded directly from the Surakarta Government website. Then data is analyzed using effective ratio and efficiency ratio. The results of this study are mentioned (1) the government has transparency in the management of local areas because everyone has access to financial statements (2) efficiency ratio and effective ratio also tend to decrease showing management of less stable governments, so it can be concluded by fund management by Surakarta government has not been accountable.

Keywords : Accountability, Transparency, Effectiveness, Efficiency

1. Pendahuluan

Menurut Bastian dalam (Septiani et al., 2022) Dalam akuntansi sektor public proses dan Analisa akuntansi mempengaruhi cara entitas pemerintah mengatur dana mereka. Untuk menghasilkan laporan keuangan, sistem akuntansi sektor public harus mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data keuangan. Para pengambil keputusan kemudian menggunakan laporan ini untuk memastikan transparansi finansial. Akuntansi di sektor publik

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published under licence by Antartika Media Indonesia.

sangat penting untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban serta pengelolaan dana negara yang efisien di antara organisasi dan proyek. Ini memberikan data penting tentang pengelolaan ekonomi yang efisien, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengelolaan yang efektif. Selain itu, akuntansi sektor publik memungkinkan manajer untuk bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, mengawasi program dan sumber daya sesuai kewenangan, dan membantu pejabat pemerintah menyusun laporan yang tepat.

Laporan keuangan sektor publik adalah kumpulan data yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang kinerja keuangan pemerintah selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan ini menunjukkan posisi laporan keuangan terhadap transaksi yang terjadi. Adapun tujuan pelaporan keuangan ialah : (a) menyediakan informasi laporan keuangan sebagai dasar penimbangan dalam pengambilan keputusan; (b) menyediakan informasi tentang sumber daya dan penggunaan keuangan pemerintah daerah; (c) menyediakan informasi kepada pihak eksternal tentang cara mendanai kebutuhan yang diperlukan dan bagaimana pihak berkepentingan memenuhi kewajibannya; dan (d) memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah daerah selama periode waktu. (Sari et al., 2020)

Pengertian Keuangan Daerah, menurut (Suwanda et al., 2020) ialah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap wilayah untuk menghasilkan uang dari berbagai sumber, seperti dana dari pemerintah pusat, pinjaman lokal, pajak daerah, dan pendapatan lain yang legal. Akuntansi publik adalah cabang akuntansi yang menangani organisasi nirlaba dan pemerintah, dengan fokus pada pengaturan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bertanggung jawab atas penggunaan dana kepada pihak berwenang tertinggi di pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan akuntabilitas yang dikeluarkan secara berkala oleh pemerintah lokal (kabupaten atau kota) yang mencakup posisi keuangan, realisasi anggaran, aliran kas, dan performa keuangan pemerintah daerah..

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen yang menampilkan ringkasan dari sumber, penyaluran, serta penggunaan dana keuangan yang dioperasikan oleh pemerintah lokal. Dokumen ini mengilustrasikan perbandingan antara rencana anggaran dengan hasil yang sebenarnya terjadi selama satu periode laporan. Laporan ini secara eksplisit mencakup elemen-elemen seperti pendapatan dan belanja. Pendapatan dalam konteks ini adalah jumlah yang diterima oleh Kas Umum Daerah atau oleh lembaga pemerintah lain yang meningkatkan saldo positif anggaran pada tahun anggaran yang berlaku dan merupakan hak pemerintah yang tidak memerlukan pengembalian dana. Sementara itu, belanja merujuk pada semua transaksi keluar yang dilakukan oleh Kas Umum Daerah yang berdampak pada pengurangan saldo positif anggaran pada tahun anggaran yang sama dan tidak akan ada penggantian pembayaran dari pemerintah. (Fitri, 2019)

Laporan realisasi anggaran dibuat untuk menggabungkan informasi tentang pencapaian dan realisasi anggaran dari entitas yang melaporkan. Membandingkan anggaran dengan hasil nyata menunjukkan seberapa jauh eksekutif dan legislatif telah mencapai tujuan yang telah disetujui. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan detail penerimaan dan pengeluaran dengan perbandingan anggaran untuk setiap item. Selain itu, laporan ini memberikan pembaca laporan keuangan pemerintah tentang cara sumber daya ekonomi diperoleh dan digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, memungkinkan mereka untuk menilai apakah operasi atau program telah dijalankan dengan ekonomi, efektif, dan efisien sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku. (Gerung et al., 2020)

Analisa laporan keuangan pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah adalah metode untuk mengukur kinerja keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah direncanakan dengan realisasinya selama satu tahun anggaran untuk mengetahui potensi yang terjadi.Ini juga dapat dilakukan dengan mengkomparasikan rasio keuangan pemerintah daerah dengan rasio keuangan pemerintah daerah lain yang terdekat untuk melihat bagaimana posisi pemerintah daerah tersebut. DPRD, eksekutif, pemerintah pusat, provinsi, masyarakat, dan

kreditor adalah pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan daerah (Rahmadani & Rudini, 2023)

Menurut (Fathiyah, 2020) Rasio Efisiensi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai hasil atau output tertentu dengan menggunakan input atau sumber daya seminimal mungkin . Di sisi lain, efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memaksimalkan output atau hasil yang diperoleh dari sejumlah input atau sumber daya tertentu. Prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap uang yang dikeluarkan digunakan untuk membantu orang-orang sebanyak mungkin. Pengurangan pemborosan, alokasi sumber daya yang lebih tepat, dan peningkatan produktivitas dalam pelayanan publik adalah semua contohnya. Dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai pengukur kinerja, pemerintah dapat menemukan bagian anggaran pengelolaan yang perlu diperbaiki dan membuat rencana.

Menurut Handayaningrat dalam (Fauziah et al., 2022) Rasio efektivitas adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai target anggaran. Metode ini membandingkan pendapatan asli daerah yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan rasio ini berfungsi sebagai indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah. Jika sasaran dan tujuan anggaran terpenuhi dengan baik, program dianggap efektif. Jika sasaran tidak tercapai secara mampu, program dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Menurut Herindraningrum & Yuhertiana dalam (Zubaidah & Nugraeni, 2023) Laporan keuangan sangat penting untuk menunjukkan bahwa suatu entitas bertanggung jawab dan transparan, terutama pemerintahan. Akuntabilitas adalah prinsip moral yang erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, yang mencakup seluruh cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini menekankan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Transparansi adalah bagian penting dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap manajemen keuangan pemerintah dibangun melalui transparansi. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk berbicara dan menilai bagaimana dana publik dialokasikan dan dikelola. Oleh karena itu, laporan keuangan yang akuntabel dan transparan adalah kunci untuk pemerintahan yang baik, demokrasi yang sehat, dan pengelolaan keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada, Kristianten dalam (Haikal & Mauliana, 2022) ,transparansi adalah proses yang dapat diukur oleh penyelenggara pelayanan. Termasuk keterbukaan proses, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan kesediaan dan aksesibilitas dokumen. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama proses menerapkan prinsip dan asas transparansi, tujuan utama yang harus dicapai adalah memastikan bahwa semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Akbar dalam (Nasution, 2019) Pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntabilitas keuangan diharuskan untuk menerima informasi dan pengungkapan tentang aktivitas dan kinerja keuangan. Ini termasuk penyediaan informasi yang tepat waktu, pertanggungjawaban atas dana publik, dan audit atau tanggapan pemerintah. Prinsip akuntabilitas publik menentukan seberapa baik penyelenggaraan layanan sesuai dengan prinsip, standar, atau aturan yang datang dari sumber eksternal.

Untuk menjamin bahwa dana anggaran publik digunakan secara tepat juga transparan, pemerintah harus melakukan manajemen keuangan yang baik. Pemerintah Kota Surakarta, Indonesia, berkomitmen untuk mengatur dana mereka secara transparan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan masyarakat dan mendorong perkembangan wilayah. Kota Surakarta, telah berkembang pesat menjadi kota metropolis. Meskipun demikian, tetap sederhana berkat warisan budaya yang tetap ada. Kota ini tetap mempertahankan sistem kepangeranan sebagai adat istiadat, meskipun tanpa kepentingan politik yang nyata, yang

sekarang berada di bawah administrasi provinsi Jawa Tengah. Dengan Pakubuwono XII sebagai pemimpin Keraton Surakarta, dan Mangkunegara IX memimpin Keraton Mangkunegara. (Primasasti, 2022)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana memanfaatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data deskriptif untuk memahami fenomena manusia dan social (Ardiansyah et al., 2023) .Metode kualitatif ialah pendekatan yang didasarkan pada paham postpositivisme yang dipakai untuk mengkaji objek alamiah dengan berfokus pada keunikan objek yang diteliti bukan pada generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan gambaran umum mengenai realitas sosial dari sudut pandang responden. Pemahaman ini tidak ditentukan secara langsung, namun analisis terhadap realitas terlebih dahulu dilakukan dari realitas sosial yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2023)

Penelitian ini menggunakan penggunaan data sekunder sebagai sumber informasinya. Data sekunder merujuk pada jenis data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, melainkan dikumpulkan melalui metode tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, data tersebut diakses dan diunduh secara langsung dari portal resmi Pemerintah Daerah Surakarta. Sumber data spesifik yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta, yang mencakup periode tiga tahun dari tahun 2020 hingga 2022. Penggunaan data sekunde semacam ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi keuangan yang telah dikompilasi dan dipublikasikan oleh pihak yang berwenang, tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer yang seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan laporan keuangan resmi yang tersedia untuk umum, penelitian ini dapat fokus pada analisis dan interpretasi data yang sudah ada untuk mencapai tujuan penelitiannya.

2.1. Metode Analisa Data

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah sektor publik, terdapat banyak alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja dan kinerja finansial. Rasio efektivitas dan efisiensi adalah dua metrik yang paling penting dari berbagai alat ukur tersebut. Kedua metrik ini berfungsi sebagai indikator penting yang membantu para pemangku kepentingan dan analis keuangan selama pemerintah telah berhasil mengelola sumber daya keuangannya .

a. Efektivitas
   Digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu pemerintah dalam mencapai target dan tujuannya dengan mengkomparasikan realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang ditentukan dalam anggaran yang dinyatakan dalam satuan moneter. Berikut merupakan rumus perhitungannya :

$$efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

b. Efisiensi
   Digunakan untuk mengukur seberapa baik pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dalam mencapai target atau tujuannya dengan membandingkan total realisasi belanja dengan total realisasi pendapatan yang dinyatakan dalam moneter. Berikut merupakan rumus perhitungannya :

$$Efesiensi = \frac{Total\ Realisasi\ Belanja\ (Pengeluaran)}{Total\ Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk menilai perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah/kota, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah menggunakan rasio-rasio standar sebagai tolak ukur perbandingan. Apabila tidak terdapat standar yang dijadikan acuan dalam memaknai rasio-rasio pemerintahan maka analisis tidak akan mampu menentukan apakah nilai rasio yang diperoleh menunjukkan kondisi yang baik atau malah sebaliknya.

Table 1 **Kriteria Rasio Efektivitas dan Efisiensi**

Rasio	Standar (%)	Kriteria
Rasio Efisien	> 100	Tidak Efisien
	90-100	Kurang Efisien
	80-90	Cukup Efisien
	60-80	Efisien
	<60	Sangat Efisien
Rasio Efektiftas	>100	Sangat Efektif
	90-100	Efektif
	80-90	Cukup Efektif
	60-80	Kurang Efektif
	<60	Tidak Efektif

Sumber : (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022)

3.1. Efisiensi

Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa baik pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dalam mencapai target atau tujuannya dengan membandingkan total realisasi belanja dengan total realisasi pendapatan yang dinyatakan dalam moneter

Tahun	Belanja				Efisiensi	Keterangan
	Anggaran		Realisasi			
2020	Rp	1.831.319.373.387	Rp	191.654.146.966	10%	Sangat Efisien
2021	Rp	1.939.268.856.769	Rp	1.866.496.348.304	96%	Kurang Efisien
2022	Rp	2.028.438.691.046	Rp	2.087.823.395.600	103%	Tidak efisien

sumber : Data diolah 2024

Berlandaskan tabel diatas menggambarkan bahwa dalam periode 2020-2023 tingkat efisiensi keuangan di Kota Surakarta tidak stabil atau berubah-ubah. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi keuangan dianggap sangat efisien karena jumlah realisasi lebih kecil dari pada jumlah anggaran, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan di kota tersebut sangat baik. Namun, pada tahun 2021, tingkat efisiensi keuangan menurun menjadi kurang efisien karena jumlah anggaran dan realisasi hampir sama, hal ini kemungkinan terjadi karena penggunaan sumber daya keuangan yang kurang efisien atau tidak maksimal. Kemudian, pada tahun 2023, tingkat keuangan efisiensi menurun lebih lanjut hingga mencapai tingkat tidak

efisien karena jumlah anggaran lebih kecil dari jumlah realisasi, yang mungkin menunjukkan adanya masalah yang lebih serius dalam mengelola keuangan daerah pada tahun tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika nilai rasio efisiensi keuangan lebih tinggi, maka pengelolaan keuangan lebih buruk pada daerah kota Surakarta.

3.2. Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu pemerintah dalam mencapai target dan tujuannya dengan mengkomparasikan realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan dalam anggaran yang diwakili dalam satuan moneter.

Tahun	Pendapatan				Efektifitas	Keterangan
	Target Penerimaan		Realisasi			
2020	Rp	402.870.481.279	Rp	492.776.208.640	122%	Sangat efektif
2021	Rp	514.200.704.362	Rp	560.579.997.086	109%	Sangat efektif
2022	Rp	740.143.061.392	Rp	647.440.585.332	87%	Cukup efektif

sumber : Data diolah 2024

Merujuk pada tabel diatas menggambarkan bahhwa dalam periode 2020-2023 tingkat efektivitas keuangan di Kota Surakarta efektif walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tingkat efektif keuangan dianggap sangat efektif karena jumlah realisasi yang dianggarkan lebih besar dari anggaran, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan di Kota tersebut sangat baik, selanjutnya di tahun 2021 terjadi sedikit penurunan namun penggunaan keuangan daerah masih pada tingkat yang sangat efektif. Kemudian di tahun 2022 tingkat efektivitas keuangan menurun lebih lanjut hingga mencapai tingkat cukup efektif yang kemungkinan terjadi karena penggunaan sumber daya keuangan yang kurang maksimal atau adanya krisis ekonomi yg terjadi pada Kota Surakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika rasio efektivitas laporan keuangan daerah lebih rendah, maka semakin tidak efektifnya pengelolaan dana daerah tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah dengan mempublikasikan laporan keuangan di website resmi sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Namun, tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya optimal karena efisiensi penggunaan sumber daya keuangan cenderung menurun, bahkan mencapai tingkat yang rendah pada tahun 2023, serta efektivitas pengelolaan anggaran mengalami penurunan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertahankan transparansi pelaporan keuangan dengan publikasi rutin, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab penurunan kinerja, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penggunaan anggaran agar efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Referensi

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Ihsan

Fathiyah, F. (2020). Analisis Efesiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(2), 687. Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V20i2.1008

Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19. *Online) JURNAL MANAJEMEN*, *14*(2), 2022–2367.

Fitri, H. (2019). *ANALISIS NERACA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH* (Y. H. Laka, Ed.; 1st Ed.). CV IRDH.

Gerung, I. R., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2020). ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BELANJA LANGSUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 15, Issue 3).

Haikal, M. F., & Mauliana, D. D. (2022). PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (CASE STUDY OF E-KTP SERVICE IN TALLO DISTRICT OFFICE MAKASSAR CITY. *Jurnal Administrasi Negara*, *28*(1).

Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020). *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research. 2022. Issue Period*, *6*(3), 612–622. Https://Doi.Org/10.52362/Jisamar.V6i3.819

Nasution, D. A. D. (2019). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, *2 No.3*, 149–162.

Primasasti, A. (2022). *Solo Dari Dulu Hingga Kini*. PEMERINTAH SURAKARTA. Https://Surakarta.Go.Id/?P=23162

Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2021. *E-Jurnal Profit (Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan)*, *8*(2), 133–143.

Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). *THE IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL TO IMPROVE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT*. *6*(1). Www.Bpk.Go.Id

Septiani, S., Defitri, S. Y., & Sukraini, J. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok). *EBISMEN | Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, *1*(3).

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. ALFABETA.

Suwanda, D., Elsye, R., & Meiyenti, I. (2020). *TEKNIK PENYUSUNAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH* (Yudi Prihanto Santoso, Ed.). PT REMAJA ROSDAKARYA.

Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *7*(3), 978–988. Https://Journal.Stiemb.Ac.Id/Index.Php/Mea/Article/View/3475/1579